



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

RENCANA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTIKARBON DAN POTENSI PENURUNAN EKSPOR INDONESIA

Rasbin

Analisis Legislatif Ahli Madya
rasbin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Belum lama ini, Uni Eropa merencanakan penerapan kebijakan pengenaan tarif barang impor yang tinggi emisi karbon atau kebijakan *carbon border adjustment* (CBAM). Kebijakan ini akan diterapkan oleh Uni Eropa dan akan diberlakukan pada tahun 2026. Ada enam jenis komoditas yang menjadi fokus perhatian dalam kebijakan CBAM. Komoditas-komoditas tersebut meliputi semen, besi dan baja, aluminium, pupuk, hidrogen, dan listrik. Implementasi kebijakan CBAM merupakan salah satu langkah nyata dari Uni Eropa terkait dekarbonisasi dalam rangka memitigasi dampak perubahan iklim.

Mengikuti Uni Eropa, Australia juga diwacanakan akan menerapkan kebijakan serupa, yaitu kebijakan CBAM. Penerapan kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban kebocoran karbon yang biasa terjadi ketika industri memindahkan produksi yang menghasilkan polusi ke negara lain dengan kebijakan iklim yang tidak terlalu ketat. Implementasi kebijakan ini akan dilakukan terhadap produk-produk ekspor yang masuk ke Australia, termasuk produk-produk dari Indonesia.

Uni Eropa dan Australia merupakan dua negara yang menjadi pasar tradisional produk-produk ekspor Indonesia. Data dari BPS menunjukkan bahwa nilai ekspor Indonesia tahun 2022 ke dua negara tersebut masing-masing mencapai US\$23,13 miliar dan US\$3,47 miliar. Angka ekspor tersebut menyumbang kontribusi terhadap total ekspor Indonesia masing-masing sebesar 7,92% dan 1,19%. Namun, ekspor Indonesia sepanjang tahun 2023 ke Uni Eropa dan Australia mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022. Ekspor Indonesia tahun 2023 ke Uni Eropa dan Australia masing-masing sebesar US\$16,65 miliar dan US\$3,18 miliar atau turun masing-masing sebesar -28,02% (*year-on-year, yoy*) dan -8,36% (*yoy*).

Pada tahun 2024, yaitu periode Januari-April 2024, nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa turun sebesar -6,06% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Sepanjang Januari-April 2024, nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa mencapai US\$5,52 miliar, namun, untuk periode Januari-April 2023 sebesar US\$5,88 miliar. Berbeda dengan Uni Eropa, ekspor Indonesia ke Australia justru mengalami kenaikan sepanjang Januari-April 2024. Ekspor Indonesia periode Januari-April 2024 ke Australia mencapai US\$1,49 miliar atau naik sebesar 68,8% dibandingkan periode Januari-April 2023.

Komoditas utama ekspor Indonesia ke Uni Eropa meliputi lemak dan minyak hewani/nabati (HS15), alas kaki (HS64), berbagai produk kimia (HS38), bahan bakar mineral (HS27), dan mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS85). Tidak jauh berbeda dengan Uni Eropa, komoditas utama ekspor Indonesia ke Australia juga terdiri atas produk-produk dengan kode HS85, HS84 (reaktor nuklir, *boilers, machinery*, dan bagiannya), HS31 (pupuk), HS27, dan HS44 (kayu).

Baik kebijakan CBAM Uni Eropa ataupun Australia akan diberlakukan kepada importir-importir melalui sistem sertifikasi. Tentunya, implementasi kebijakan ini akan memicu peningkatan biaya jika produk-produk ekspor yang masuk ke Uni Eropa atau Australia tidak sesuai standar emisi di kedua negara tersebut, termasuk produk-produk dari Indonesia. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Indonesia. Jika tidak maka ada potensi penurunan ekspor Indonesia ke dua negara tersebut. Akhirnya, hal ini akan memengaruhi neraca perdagangan Indonesia (NPI) dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Atensi DPR

Uni Eropa mewacanakan akan menerapkan kebijakan pengenaan tarif barang impor yang tinggi emisi karbon atau kebijakan *carbon border adjustment* (CBAM) pada tahun 2026. Langkah serupa juga akan dilakukan oleh Australia terhadap produk-produk yang masuk ke negara tersebut, termasuk produk-produk dari Indonesia. Implementasi kebijakan tersebut akan memicu peningkatan biaya jika produk-produk ekspor yang masuk ke Uni Eropa atau Australia tidak sesuai standar emisi di kedua negara tersebut. Jika Pemerintah Indonesia tidak mengantisipasi hal tersebut, ada potensi penurunan ekspor Indonesia ke dua negara tersebut. Tentunya, kondisi ini akan memengaruhi neraca perdagangan Indonesia (NPI) dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menyikapi hal tersebut, DPR RI, khususnya Komisi VI melalui fungsi pengawasan perlu terus mendorong Kementerian Perdagangan dan *stakeholder* terkait lainnya untuk mengembangkan perdagangan hijau dan berkelanjutan serta diversifikasi ke produk-produk hijau dengan kompleksitas yang lebih tinggi.

Sumber

bps.go.id, 9 Juni 2024;
ekonomi.bisnis.com, 4 Juni 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024